

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Bekasi Minta Bantuan Keuangan DKI Rp 1 T

BEKASI – Pemkot Bekasi meminta bantuan keuangan ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp1 triliun pada 2020. Anggaran tersebut untuk kompensasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik DKI dan dana kemitraan.

Anggaran kompensasi TPST diusulkan Rp367 miliar. Dana itu sebagai pemberian uang bau sampah kepada 18.000 kepala keluarga (KK) terdampak TPST Bantargebang yang dibagikan Rp900.000 per tiga bulan sekali dan pembangunan infrastruktur di kawasan itu. “Untuk dana kemitraan kami mengusulkan Rp400-500 miliar,” kata Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Bekasi Dinar Faizal Badar, kemarin.

Dana kemitraan juga memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di luar kawasan Bantargebang, seperti pembangunan jalan dan lainnya. Pemkot Bekasi mengklaim DKI sudah sepakat dengan bantuan itu. Permintaan bantuan keuangan telah disampaikan ke Pemprov DKI melalui proposal di bagian kerja sama dan investasi (KSI) Kota Bekasi. “Belum dapat informasi nilai yang disetujui. Kami masih menunggu DKI, tapi saya yakin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengalirkan anggaran kemitraan tersebut,” ujar Dinar.

Berdasarkan data KUA-PPAS APBD DKI 2020, Kota Bekasi mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp406 miliar. Nominal itu turun drastis dibandingkan dengan pemberian bantuan tahun ini sebesar Rp750 miliar. “Kami belum bisa menanggapi (turunnya nilai bantuan keuangan) karena belum dapat angka pastinya,” ungkap Dinar.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menuturkan, usulan bantuan keuangan sudah diberikan

ke Pemprov DKI beberapa waktu lalu. Hingga saat ini Pemkot Bekasi belum menerima fotokopi bantuan keuangan untuk tahun 2020. “Saya belum dapat data kopian bantuan hibah dari DKI,” ucapnya.

Menurut dia, bantuan anggaran dari Pemprov DKI lebih besar dibandingkan dengan Pemprov Jawa Barat. Bahkan, bantuan DKI hampir mencapai Rp1 triliun persisnya Rp986 miliar yang diberikan sejak 2016-2019. “Beda jauh kan? Jabar hanya Rp66 miliar dalam rentang waktu yang sama. Bekasi itu mendapatkan perhatian lebih dari DKI, maka lebih baik Bekasi gabung ke Jakarta daripada Jabar,” ujar Rahmat.

Padahal Jabar sebagai wilayah induk Kota Bekasi seharusnya memberikan kontribusi lebih besar daripada DKI yang hanya sebagai daerah mitra. Jika bantuan DKI tersebut cair, banyak hal bisa dilakukan Pemkot Bekasi mulai dari membangun jembatan atau flyover hingga pembangunan infrastruktur lainnya.

DPRD Kota Bekasi mendukung penuh usulan bantuan keuangan ke Pemprov DKI. Daerah mitra memang sepatutnya dapat, apalagi sebagian kepentingan DKI berada di wilayah Kota Bekasi seperti TPST Bantargebang. “Usulan itu sangat wajar, apalagi DKI selama ini berkomitmen membangun kota mitranya,” kata Anggota DPRD Kota

Bekasi Sholihin.

Dia meminta Pemprov DKI mengevaluasi dana kemitraan untuk Pemkot Bekasi yang sudah masuk pembahasan di KUA-PPAS, karena dana yang akan dicairkan pada 2020 sebesar Rp406 miliar. Sejauh ini dana kemitraan yang dikucurkan Pemprov DKI digunakan

membangun flyover Cipendawa dan Rawa Panjang demi kebutuhan akses truk sampah DKI ke TPST Bantargebang. Dana juga dipakai untuk pembenahan atau pemeliharaan Bantargebang sekaligus pemeliharaan infrastruktur jalan menuju TPST. “Mungkin sisanya untuk pembangunan infrastruktur lain.

Tentu kami mendukung apa yang telah diajukan Pemkot Bekasi,” ucapnya.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Les-tari mengatakan, usulan bantuan keuangan dari Pemkot Bekasi saat ini belum dibahas karena badan anggaran (banggar) belum jalan. Bantuan tersebut

akan dilihat dari proposal usulannya.

Selama ini bantuan keuangan untuk kota-kota penyangga berjalan baik, misalnya Pemkot Bekasi yang sejak 2016-2019 terakumulasi hingga Rp1 triliun. Bahkan, Wali Kota Bekasi berterima kasih atas bantuan keuangan dari Pemprov DKI

selama ini dan membandingkan dengan bantuan Pemprov Jabar yang hanya Rp66 miliar. “Salah satu bantuannya untuk Flyover Cipendawa yang kami harap diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun ini,” kata Premi.

● **abdullah m surjaya/
bima setiyadi**

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Bekasi Minta Bantuan Keuangan DKI Rp 1 T

DEMI KEPENTINGAN JAKARTA

Bantuan Pemprov DKI untuk Pemkot Bekasi tidak semata-mata bagi warga setempat. Anggaran kemitraan yang diberikan selama ini juga demi kepentingan Jakarta, seperti TPST Bantargebang dan akses infrastruktur daerah mitra.

BANTUAN KEMITRAAN DARI DKI

2015
Rp98 miliar

- Pembangunan sisi selatan Jalan Kalimalang.
- Pembangunan jalan dan jembatan Bojong Menteng dan Jatiasih.
- Penyelesaian pembangunan jembatan dan pelebaran jalan di sekitar Pintu Tol Bekasi Timur.

2016
Rp151 miliar

- Rehabilitasi Jalan Pangkalan 2 menuju Jalan Pangkalan 5.
- Rehabilitasi Jalan Pangkalan 5 menuju TPST Bantargebang.
- Pengadaan alat spider excavator sebanyak 4 unit.
- Pengadaan alat amphibious excavator sebanyak 1 unit.
- Peningkatan Jalan Cikunir.
- Pembangunan sumur artesis.
- Pembebasan lahan dan pelebaran Jalan Pasar Rebo Komsen-Jati Asih.

2017
Rp248 miliar

- Pembangunan dan pelebaran jalan serta jembatan Jatiwaringin Raya.
- Pembangunan Flyover Rawa Panjang dan Flyover Cipendawa.

2018
Rp195 miliar

- Anggaran kemitraan tidak diberikan DKI, namun hanya uang community development (CD) untuk warga TPST Bantargebang.

2019
Rp423 miliar

- Pembangunan Flyover Cipendawa dan Flyover Rawa Panjang
- Penerangan jalan umum
- Pembuatan saluran di bawah Jalan Tol Buaran
- Uang community development untuk warga TPST Bantargebang

BANTUAN DARI JABAR

2017: Rp16 miliar

2018: Rp5,7 miliar

2019: Rp27 miliar

Setoran Biaya BBNKB dari Kota Bekasi ke Pemprov Jabar Rp2 triliun.